

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfiah, R. N. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV Akademika Presindo.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana Perdata dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asas Sukses.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Ashofa Burhan. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2013). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Press.
- H. Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Peyidikan & Penegakam Hukum Pidana Melalui Pendekatan hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- H.R. Otje Salman, & Anton F. Susanto. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. PT Alumni.

- Ilyas, A. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Genta Publishing.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Jaholden. (2021). *Pra-Peradilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. CV. AA. RIZKY.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi I*. Liberty.
- Moeloeng, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni.
- Prinst, D. (1989). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rommelink. (2003). *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia.
- Roberts, P., & Zuckerman, A. (2010). *Criminal Evidence*. Oxford University.
- Sidharta, A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tanusubroto. (1982). *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni.
- Wahidin, S. (2014). *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Wirjono Prodjodikoro. (1967). *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapann KUHP*. Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

### C. Sumber Lain

Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA. *IBLAMLAWREVIEW*, 4(1), 480.

Biya, C. I. B. P., & Utari, A. A. S. (2018). DASAR HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA. *Journal Ilmu Hukum*, 07(01), 3.

Effendi, E. (2020). Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Undang:JurnalHukum*, 3(2), 270.

Malik. (2009). Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 80.

M.A.S., W. J., & Simangunsong, F. (2022). MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERIN. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 240.

Masinambow, V., Barama, M., & Mohede, N. (2023). PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM

PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO). *Lex Adminstratum*, 11(2), 9.

- Arsil. (2016). *Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan*. hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan-lt569927199518f/>
- Baraka. (2022, Juni 6). Tujuan Hukum Menurut Para Ahli.  
<https://baraka.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>
- Hamzah, M. C. (2014). *Penjelasan Hukum (Restatement) Bukti Permulaan Yang Cukup*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Ilyas, A. (2024). *Praperadilan: Pengertian, Pihak, Mekanisme, Dan Hakikat - Literasi Hukum Indonesia*. [www.literasihukum.com](http://www.literasihukum.com).  
<https://literasihukum.com/praperadilan-pengertian-pihak-mekanisme-dan-hakikat/>
- Nelson, D. (2023). *Seluk Beluk Praperadilan: Dari Objek Hingga Upaya Hukumnya*. hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-praperadilan-cl7035/>
- Otje Salman, & Anton F. Susanto. (2009). *Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Penegakkan Hukum di Indonesia, Dalam Kapita Selekta Hukum Tim Peneliti Pakar Hukum Universitas Padjadjaran*. Widya Padjadjaran
- Pakpahan, A. (2024). Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Badamai Law Journal*, 9(1), 90.
- Pangabean, J. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Pra/2018/Pn.Mdn) . *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 47–48.
- Puspitasari, E. K. (2022). *DASAR GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS IB*. [pn-sumedang.go.id](http://pn-sumedang.go.id).

- Qomarudin, M. N. (2014). Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidik Polri dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pontianak Kota). *JurnalNestorMagisterHukum*, 17.
- Raksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Ramadhan, R. N. (2022). Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laporkan Tindak Pidana Penganiayaan. *JurnalPenegakanHukumIndonesia*, 3(1), 45.
- Rambe, M. I. I. (2017). Upaya Hukum Peraperadilan. *Jurnal Pionir LLPM Universitas Asahan*, 2(3), 3–4.
- Savitri, W., & Simangunsong, F. (2023). PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PASCA DIPERLUASNYA OBJEK PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/PID.PRA/2022/PN. JBG). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* , 3(1), 92.
- Simbolon, G. (2016). Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan. *Jurnal USU Law Jurnal*, 4(2p), 158.
- Syafridatati, Surya Prahara, & Febriana Anissa. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Wahyuni, W. (2024, Agustus 20). *Tata Cara Penetapan Tersangka*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-penetapan-tersangka-lt62a6f769cd4de/>
- Yuliartha, I. G. (2009). Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Law Reform*, 13.
- Zakaria, A. (2006). Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *RisalahHukumFakultasHukuUnmul*, 2(2), 136.